



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Selasa, 28 MEI 2019</b>
Waktu	: Pukul 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2019
Ketua Rapat	: <b>DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. Menteri Sosial 2. 28 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI 3. 4 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum dengan didampingi Wakil Ketua Komisi VIII TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, Wakil Ketua Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M. Sc dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **“Membahas Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui kebijakan Menteri Sosial melakukan optimalisasi dan realokasi anggaran Kementerian Sosial tahun Anggaran 2019 dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak dan tanpa mengurangi target yang telah ditetapkan dalam RKP 2019. Adapun beberapa potensi anggaran yang dapat dioptimalkan, yaitu:
  - a. Optimalisasi *Safeguarding* Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  - b. Optimalisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang berasal dari adanya kelebihan biaya pembelian beras.
  
2. Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil optimalisasi dan realokasi anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp115.000.000.000,- (Seratus lima belas milyar rupiah ) dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan rincian:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp92.000.000.000,- (Sembilan puluh dua milyar rupiah) untuk kebutuhan:
    - 1) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) untuk pengembangan sistem, server dan revitalisasi jaringan.
    - 2) Biro Umum sebesar Rp40.000.000.000,- (Empat puluh milyar rupiah) untuk revitalisasi sarana dan prasarana Gedung Cawang Kencana.
    - 3) Biro Humas sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) untuk peningkatan publikasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial khususnya pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah),- untuk kebutuhan:
    1. Perluasan Area Makam di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebesar Rp6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah).
    2. Pemandahan makam pejuang ke Taman Makam Pahlawan Nasional Seroja di Timor Leste sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)
    3. Renovasi Makam Pahlawan Nasional Nani Wartabone di Gorontalo sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
  - c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah) untuk penguatan Balai Rehabilitasi Sosial.
3. Komisi VIII DPR RI setelah memberikan persetujuan juga menyampaikan pandangan dan pendapat atas kebijakan Menteri Sosial dalam melakukan optimalisasi dan realokasi anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019 dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh beberapa hal penting sebagai berikut:
- a. Memastikan penggunaan anggaran hasil realokasi anggaran tahun 2019 mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Kementerian Sosial sesuai target sasaran yang hendak dicapai.
  - b. Penggunaan anggaran realokasi untuk penguatan Balai Rehabilitasi Sosial diharapkan termasuk balai pelayanan sosial lanjut usia.
  - c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga bahkan antar negara terkait pemindahan makam pejuang ke Taman Makam Pahlawan Nasional Seroja di Timor Leste.
  - d. Revitalisasi sarana dan prasana harus mendukung penguatan kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan komunikasi.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 16.33 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**Dr. H.M. Ali Taher, SH, M.Hum.**